



PT. BPR SATYADHANA ARTHA

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA Tahun 2022

🏠 Jl. Letjen Sutoyo No.70, Waru - Sidoarjo
☎ 031-8531995
📠 031-8554177

Sistem Informasi Laporan Tata Kelola - Mandiri Consulting

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



BANK
PERKREDITAN
RAKYAT



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Satyadhana Artha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Satyadhana Artha beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR

Melindungi kepentingan stakeholder

Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR SATYADHANA ARTHA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat.

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Satyadhana Artha berkomitmen untuk senantiasa melakukan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Satyadhana Artha dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Ahmad Mazid Labib, SH</p> <hr/> <p>NIK :</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan - Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR dan peraturan perundang-undangan - Membuat Rencana Bisnis Bank dan mengawasi pelaksanaannya - Mengangkat dan memberhentikan pejabat maupun staff dan karyawan perusahaan - Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi audit intern BPR, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan / atau otoritas lainnya. - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris - Mewakili Perusahaan dibidang Hukum - Pemutus/ menyetujui kredit sesuai batasan wewenang aturan BPR - Bertanggung jawab kepada Pemegang Saham yang berkaitan dengan perkembangan BPR - Bertanggung jawab atas kelancaran operasional bank sesuai dengan Rencana Bisnis bank yang disusun Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris - Mentaati segala peraturan dan perubahan yang ditetapkan RUPS - Mentaati ketentuan-ketentuan dan Peraturan Pemerintah serta OJK
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Fenny Limintono, SE</p> <hr/> <p>NIK :</p> <hr/> <p>Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank - Memastikan bahwa seluruh kebijakan ,



	<p>ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas, apabila untuk pembuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi - Bersama Direktur Utama melakukan tugas kepengurusan Bank untuk menyusun Rencana Bisnis Bank yang berupa rencana strategi memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai untuk selanjutnya disampaikan ke OJK - Menindak lanjuti hasil temuan Audit intern maupun pengawasan Otoritas Jasa Keuangan - Pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko BPR terhadap seluruh bagian - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh Komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
--	---

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Direksi telah mengupayakan pendekatan kepada vendor-vendor dari Samator Group, dan di tahun 2022 telah bertambah 2 (dua) debitur kredit Cessie baru yaitu PT. Alva Centra Gemilang dan CV. Tritunggal Jaya.
2. Direksi telah melakukan pengembangan ekspansi Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kilat dengan bekerjasama kepada pihak outsourcing.
3. Penambahan karyawan bagian Account Officer telah dilakukan, namun masih ada kendala pada kemampuan AO baru sehingga target kredit belum tercapai.
4. Direksi telah memastikan penerapan Manajemen Risiko dalam proses kredit dan Tata Kelola di BPR.
5. BPR telah melakukan kerjasama dengan Bank Sinarmas Syariah untuk meningkatkan fee base income BPR.
6. Telah dilakukan pengkinan SOP Audit Intern, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
7. Direksi telah melakukan pengawasan NPL, fokus melakukan penagihan atas kredit bermasalah serta hapus buku.
8. Penerapan APU-PPT telah dilakukan di BPR, dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang DTTOT
9. BPR telah membuat Aplikasi SLIK, penggunaan sesuai batasan wewenang. Telah di sosialisasikan ke karyawan dan akan di implementasikan pada bulan Januari 2023.
10. Direksi telah menindak lanjuti konfirmasi hasil pemeriksaan OJK dan hasil temuan Audit Intern BPR.
11. Ekspansi Kredit Multiguna telah berjalan mulai bulan September 2022.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: Muriani Harsono, SS, MBA
	NIK	:
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan



		<p>Rencana Bisnis BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi - Mengambil keputusan dalam bidang penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris		
1	Nama	: Dra Ec Sri Rahayu
	NIK	:
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR - Memastikan BPR telah melakukan penerapan Manajemen Risiko secara efektif - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau otoritas lainnya - Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas : a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
Rekomendasi Kepada Direksi		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendekatan ke vendor-vendor di Samator group untuk menggunakan fasilitas kredit Cessie di BPR. 2. Meningkatkan ekspansi kredit. 3. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan Tata Kelola. 4. Penambahan karyawan marketing agar direalisasikan. 5. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan fee base income BPR. 6. Bekerja sama dengan perusahaan outsourcing untuk pemberian KTA kilat dengan prinsip kehati-hatian. 7. Segera melakukan penyesuaian dan pengkinian pedoman Audit Intern, Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 8. Direksi untuk memperhatikan penerapan APU-PPT. 9. Pemantauan penggunaan data SLIK debitur secara hati-hati. 10. Direksi untuk menindak lanjuti konfirmasi hasil pemeriksaan OJK dan hasil temuan dari audit intern BPR. 11. Meningkatkan penagihan kredit non lancar dan hapus buku untuk menurunkan NPL

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)



a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ahmad Mazid Labib, SH		-	-
2	Fenny Limintono, SE		-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ahmad Mazid Labib, SH			PT. ANEKA GAS INDUSTRI	-
2	Ahmad Mazid Labib, SH			PT. SAMATOR	-
3	Ahmad Mazid Labib, SH			PT. SAMATOR LAND	-
4	Ahmad Mazid Labib, SH			PT. SATYADHIKA BAKTI	-
5	Ahmad Mazid Labib, SH			PT. ANEKA MEGA ENERGI	-
6	Ahmad Mazid Labib, SH			PT. SANDANA MULTIGAS	-
7	Fenny Limintono, SE			PT. ANEKA GAS INDUSTRI	-
8	Fenny Limintono, SE			PT. SAMATOR	-
9	Fenny Limintono, SE			PT. SAMATOR LAND	-
10	Fenny Limintono, SE			PT. SATYADHIKA BAKTI	-
11	Fenny Limintono, SE			PT. ANEKA MEGA ENERGI	-
12	Fenny Limintono, SE			PT. SANDANA MULTIGAS	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ahmad Mazid Labib, SH		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Fenny Limintono, SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ahmad Mazid Labib, SH		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Fenny Limintono, SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada



D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	Muriani Harsono, SS, MBA		-	-
2	Dra Ec Sri Rahayu		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Muriani Harsono, SS, MBA			PT. ANEKA GAS INDUSTRI	-
2	Muriani Harsono, SS, MBA			PT. SAMATOR	-
3	Muriani Harsono, SS, MBA			PT. SAMATOR LAND	-
4	Muriani Harsono, SS, MBA			PT. SATYADHIKA BAKTI	-
5	Muriani Harsono, SS, MBA			PT. ANEKA MEGA ENERGI	-
6	Muriani Harsono, SS, MBA			PT. SANDANA MULTIGAS	-
7	Dra Ec Sri Rahayu			PT. ANEKA GAS INDUSTRI	-
8	Dra Ec Sri Rahayu			PT. SAMATOR	-
9	Dra Ec Sri Rahayu			PT. SAMATOR LAND	-
10	Dra Ec Sri Rahayu			PT. SATYADHIKA BAKTI	-
11	Dra Ec Sri Rahayu			PT. ANEKA MEGA ENERGI	-
12	Dra Ec Sri Rahayu			PT. SANDANA MULTIGAS	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Muriani Harsono, SS, MBA		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Dra Ec Sri Rahayu		tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Muriani Harsono, SS, MBA		tidak ada	tidak ada	RASID HARSONO-Saudara Kandung, HEYZER HARSONO-Saudara Kandung, GRACE PERADHANA HARSONO-Ada hubungan, RACHMAT HARSONO-Ada hubungan, IMELDA MULYANI HARSONO-Ada hubungan
2	Dra Ec Sri Rahayu		tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	281.100.000	2	238.200.000
2	Tunjangan	2	59.557.950	2	36.990.500
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			340.657.950		275.190.500

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-



G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,60	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,41	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,17	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,28	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,11	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2022-3-21	4	1.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR ; 2. Perubahan PSP, Ekspansi Kredit dan Dana Pihak Ketiga; 3. Pengembangan SDM; 4. Lain-lain
2	2021-6-4	4	1.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR; 2. Penanganan proses kredit, RUPS untuk perubahan Pemegang Saham dan penambahan modal disetor; 3.Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan OJK; 4. Lain-lain
3	2022-9-29	4	1.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR; 2. Evaluasi permintaan persetujuan Pemegang Saham tentang pengajuan pengunduran diri Komisaris utama; 3. Evaluasi kebijakan di BPR
4	2022-12-8	4	1.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR; 2. Menyetujui RBB untuk Tahun 2003; 3. Pembahasan perubahan Core Banking; 4. Lain-lain

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Muriani Harsono, SS, MBA		3	1	100,00%
2	Dra Ec Sri Rahayu		3	1	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-



J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2022-06-27	Sosial	Sumbangan uang duka	Karyawan BPR	1.000.000

M. PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Satyadhana Artha posisi 31 Desember 2022, agar diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Waru - Sidoarjo, 30 Maret 2023
Persetujuan Pengurus PT. BPR Satyadhana Artha

Muriani Harsono, SS, MBA
Komisaris Utama

Ahmad Mazid Labib, SH
Direktur Utama